



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE**

NOMOR : 22 / DPRK-Pidie / 2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
PIDIE TERHADAP PEMBAHASAN RANCANGAN QANUN KABUPATEN PIDIE
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN PIDIE
TAHUN ANGGARAN 2022**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai ketentuan sesuai ketentuan dalam Pasal 194 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ditentukan bahwa Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepala DPRD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir untuk dibahas Kepala Daerah bersama DPRD guna mendapat persetujuan bersama paling lambat 7 (tujuh) bulan setelah tahun anggaran berakhir ;
 - b. bahwa untuk efektif dan kelancaran dalam proses pembahasan Rancangan Qanun Kabupaten Pidie tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Tahun 2022, DPRK Pidie perlu kiranya dibentuk Panitia Khusus DPRK Pidie sebagai bentuk tindakan untuk menilai dan menjamin pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai dengan tujuan dan perencanaan ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara ;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh ;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie.

- Memperhatikan:**
1. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRK Pidie tanggal 5 Juli 2023 ;
 2. Surat Fraksi Partai Aceh DPRK Pidie Nomor : 05/ FPA/ VII / 2023 tanggal 6 Juli 2023 perihal Pengajuan Anggota Pansus LHP dan P-APBK ;
 3. Surat Fraksi Partai Golkar DPRK Pidie Nomor: 04/ F.PG/ VII/ 2023 tanggal 6 Juli 2023 perihal Pengajuan Anggota Pansus LHP dan P-APBK ;
 4. Surat Fraksi Partai Gerindra DPRK Pidie Nomor : 03/F.P-Gerindra/ VII/ 2023 tanggal 6 Juli 2023 perihal Pengajuan Anggota Pansus;
 5. Surat Fraksi Partai Demokrat DPRK Pidie Nomor : 03/ F.PD/ VII/2023 tanggal 6 Juli 2023 perihal Pengajuan Anggota Pansus LHP dan P-APBK ;
 6. Surat Fraksi Nanggroe Restorasi Kebangsaan DPRK Pidie Nomor : 04/ F.NRK/ VII/ 2023 tanggal 6 Juli 2023 perihal Pengajuan Anggota Pansus LHP dan P-APBK ;
 7. Surat Fraksi Partai Daerah Aceh DPRK Pidie Nomor : 04/ F.PDA/ VIII/2023 tanggal 6 Juli 2023 perihal Pengajuan Anggota Pansus LHP dan P-APBK ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
KESATU : Membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie terhadap Pembahasan Rancangan Qanun Kabupaten Pidie Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2022 dengan susunan personalianya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KEDUA** : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas melakukan pengkajian awal terhadap laporan keuangan dan melakukan peninjauan lapangan terhadap program kegiatan yang dananya bersumber dari APBK Tahun 2022.
- KETIGA** : masa dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie dapat melakukan :
- Peninjauan Lapangan ke Kecamatan-Kecamatan dalam Kabupaten Pidie;
 - Mengunjungi SKPK/Unit Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Pidie;
 - Memanggil SKPK/Unit Kerja terkait; dan/atau
 - Tindakan lainnya sesuai perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Sesuai Hasil rapat Badan Musyawarah DPRK Pidie Tanggal 5 Juli 2023 akan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya dalam sidang Paripurna DPRK Pidie pada Tanggal 25 Juli 2023.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan keputusan ini, dibebankan pada APBK Pidie melalui DPPA-SKPD Sekretariat DPRK Pidie Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sigli
pada tanggal 7 Juli 2023 M
19 Dzulhijjah 1444 H

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE
KETUA,**



MAHFUDDIN ISMAIL

Lampiran – Keputusan DPRK Pidie

Nomor : 02 /DPRK-Pidie/2023

Tanggal : 7 Juli 2023 M
19 Dzulhijjah 1444 H

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA KHUSUS TERHADAP PEMBAHASAN
RANCANGAN QANUN KABUPATEN PIDIE TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN
TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Nasrul Syam, SH	Ketua	
2.	Syarifuddin, S.Ag	Wakil Ketua	
3.	Cut Nur Azizah, SE, MM.	Sekretaris	
4.	Abdullah	Anggota	
5.	Zulfazli, SE, MM.	Anggota	
6.	Tgk. Muhammad Nur, S.H.I	Anggota	
7.	Abdullah Ali, S. Ag, M.Pd	Anggota	
8.	Antaruddin	Anggota	
9.	Muhammad	Anggota	
10.	Muhammad, S.Pd.I	Anggota	
11.	Juwakir, SH	Anggota	
12.	Tgk. H. Abdul Manaf, S.Sos.I	Anggota	
13.	T. Zulkarnaini, S.P	Anggota	
14.	Rustina	Anggota	
15.	Ida Susanti	Anggota	

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE
KETUA,**



MAHFUDDIN ISMAIL